

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KEPALA
DAERAH DARI TNI/POLRI AKTIF OLEH KEMENDAGRI DALAM
PRESPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :

DIMAS ALVIORY RACHMAD
1810012111094

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No Reg : 24/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No Reg : 24/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : Dimas Alviory Rachmad
NPM : 1810012111094
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisi Yuridis Penetapan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Dari TNI/POLRI aktif Oleh Kemendagri Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bahagian Hukum Tata Negara pada Hari Jumaat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Ketua)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Anggota)
3. Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

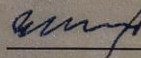
PERSETUJUAN SKRIPSI
No Reg: 24/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : Dimas Alviory Rachmad
NPM : 1810012111094
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : Analisi Yuridis Penetapan Pelaksana TUGAS Kepala
Daerah Dari TNI/POLRI aktif Oleh Kemendagri
Meneurut Prespektif Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Telah disetujui pada hari **Jumaat** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Juli**
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

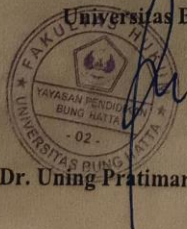
Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag,M.H)

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DARI TNI/POLRI AKTIF OLEH KEMENDAGRI DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Dimas Alviory Rachmad¹, Dr Boy Yendra Tamin S.H,M.H¹
¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: dimasalvioryrachmad@gmail.com

ABSTRAK

Menjadi perhatian oleh pemerintah pusat terkhususnya mendagri dalam penunjukan PLT kepala daerah yang berasal dari Polri/TNI aktif. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana kedudukan Tugas Kepala Daerah dari TNI/POLRI aktif oleh kemendagri dalam prespektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? (2) Implikasi hukum kedudukan Tugas Kepala Daerah dari TNI/POLRI aktif oleh kemendagri dalam prespektif undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? Jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian: Analisis Yuridis Penetapan PLT Kepala Daerah Dari Tni/Polri Aktif Oleh Kemendagri Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (1) Pengaturan penunjukan PLT kepala daerah dari tni/Polri aktif oleh kemendagri diatur Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai “Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota POLRI setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.” (2) Implikasi hukum kedudukan Tugas Kepala Daerah dari TNI/POLRI aktif oleh kemendagri dalam prespektif undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sangat bertentangan dengan tugas dan wewenang TNI-Polri aktif, mengingat PLT/PJ kepala daerah merupakan jabatan desentralisasi kepentingan pemerintah pusat kepada daerah.

Kata Kunci : Kepala Daerah, TNI/POLRI, Aparatur Sipil Negara

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian	
D. Metode Penelitian	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang pelaksana tugas kepala daerah	
B. Tinjauan tentang kementrian dalam negeri.....	
C. Tinjauan Tentang TNI dan POLRI	
D. Tinjauan Tentang Aparatur Sipil Negara.....	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana kedudukan Tugas Kepala Daerah dari TNI/POLRI aktif oleh kemendagri dalam prespektif undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ?	
B. Implikasi Hukum Kedudukan Tugas Kepala Daerah Dari TNI/POLRI Aktif Oleh Kementerian Dalam Negeri Dalam Prespektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.....	

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

B. SARAN.....

DAFTAR PUSTAKA